

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya selisih anggaran belanja pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat disimpulkan bahwa:

- 1 Analisis faktor-faktor penyebab terjadinya selisih anggaran belanja pada tahun anggaran 2014-2016 adalah:
 - a Penghematan belanja daerah yang ditunjukkan dari data yang diperoleh peneliti bahwa realisasi anggaran belanja daerah selalu lebih kecil daripada yang telah dianggarkan oleh pemerintah daerah Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur. Item-item belanja daerah seperti belanja tidak langsung yakni belanja pegawai dan belanja langsung yakni belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal yang tidak terserap anggarannya tersebut mengakibatkan adanya sisa anggaran belanja daerah yang cukup besar jumlahnya.
 - b Tidak terlaksannya program dan kegiatan yang sudah direncanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur terjadi pada item belanja langsung yakni pada Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya. Program Pelayanan dan Rehabilitas Kesejahteraan Sosial, Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. Terjadinya program dan kegiatan yang tidak terlaksana dengan baik

karena adanya masalah yang terjadi pada pemerintah daerah Dinas sosial provinsi NTT tersebut yakni dilihat dari aspek perencanaan, aspek pelaksanaan dan aspek evaluasi.

- 2 Dampak yang terjadi dari Selisih Anggaran Belanja yakni Belanja Tidak Langsung dampaknya kepada pemerintah, yakni pada tunjangan-tunjangan seperti pakaian-pakaian dinas dan Belanja Langsung dampaknya kepada masyarakat yakni banyak program dan kegiatan yang tidak direalisasikan dengan baik, dari aspek perencanaan, aspek pelaksanaan dan aspek evaluasi sehingga dampaknya kepada masyarakat selaku penerima bantuan.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran kepada Pemerintah Daerah Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

- 1 Di dalam pengelolaan keuangannya Dinas sosial provinsi Nusa Tenggara Timur perlu melakukan perencanaan dengan lebih baik dan lebih cermat, seperti menetapkan target anggaran Belanja Daerah sebaik mungkin sehingga anggaran tersebut dapat terserap dengan baik.
- 2 Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan khususnya dalam menganggarkan, melaksanakan dan mewujudkan program dan kegiatan yang telah dianggarkan agar dapat memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi kesejahteraan masyarakat di provinsi Nusa Tenggara Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, syukriy. 2012. *Varians Anggaran Pendapatan dan Varians Belanja Daerah – sebuah pengantar*. <http://syukriy.wordpress.com/2012/10/16/variants-anggaran-pendapatan-daerah/>
- Bastian, Indra. 2009. *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta
- Christian Kainde, 2013. *Analisis Varians dan Pertumbuhan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Bitung*. Jurnal EMBA. Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi. Universitas Sam Ratulangi. Manado
- Febriyanti Kadir, 2015 *Varians Anggaran dan Realisasi Anggaran Belanja Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango*. Jurusan Akuntans, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
- Gede Edy Prasetya, *penyusunan dan analisis laporan keuangan pemerintah daerah*, Yogyakarta : ANDI, 2005
- <http://edukamela.blogspot.co.id/2014/04/analisis-penyebab-dan-akibat-perbedaan/>
- Kuncoro, Haryo. 2008. Jurnal Manajemen dan Terapan Tahun 1, Nomor 2. *Varians Anggaran dan Realisasi Anggaran Belanja Studi Kasus Pemerintah Daerah Provinsi DKI*. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta
- Mahmudi, 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Mardiasmo, 2007. *akuntansi Sektor Publik*. Edisi Ketiga, Yogyakarta. Andi Offset.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Menteri Negara Otonomi Daerah RI dan PAU-SE UGM
- Munandar M. 2000. *Budgeting: Perencanaan, pengkoordinasian dan Pengawasan Kerja*. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta
- Welsch, Glenn A., Ronald W. Hilton., and Paul N Gordon. (2000). *Budgeting Planning and Profit Control*. Yang diterjemahkan oleh Purwatiningsih dan Maudy Warouw dalam *Anggaran: Perencanaan dan Pengendalian Laba*. Edisi 1, Jakarta: Salemba Empat
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 13 tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keaungan Negara*
- Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*